



## Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Muhlihah<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia

email : [muflihahjufri123@gmail.com](mailto:muflihahjufri123@gmail.com)

### INFO

#### ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received 19-01-2021

Revised 05-02-2021

Accepted 10-02-2021

**Kata Kunci:**

**Sumberdaya Manusia, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Nilai Informasi, Pengawasan Keuangan, Laporan Keuangan**

**Keywords: Human Resources, Information Technology, Internal Control, Information Value, Financial Control, Financial Statements**

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Nilai Informasi, Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan uji regresi linier. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh SKPD di Kabupaten Pamekasan dengan jumlah SKPD 45 yang dilakukan dengan memilih subjek dengan menggunakan Metode Purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang melalui uji parsial bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Kualitas Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Pengawasan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Pamekasan.

### ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and test Human Resources, Information Technology, Internal Control Systems, Information Value, Financial Control to influence financial statements. This type of research is using quantitative methods using linear regression test. The population in this study were all SKPDs in Pamekasan Regency with the number of SKPD 45 which was carried out by selecting subjects using purposive sampling method. Based on the analysis of research data, it is known through a partial test that Human Resources have a significant effect on the Quality of Regional Financial Reports, Information Technology has no effect on the Quality of Regional Financial Reports, the Internal Control System has a significant effect on the Quality of Regional Financial Reports, Information Value has no significant effect on Quality of Regional Financial Reports, Financial Control has a significant effect on the Quality Financial Statements in Pamekasan Regency.

@2021 Muhlihah

Under The License CC BY-SA 4.0

## PENDAHULUAN

Semakin Bertambahnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), maka akan dapat mendorong

pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Dalam Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik

Menurut Mardiasmo (2006) dalam Mahaputra dan Putra (2014) salah satu untuk membentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah dirubah untuk yang kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan pemerintah memiliki tujuan umum untuk mempunyai kemampuan yang prediktif dan prospektif dalam hal memprediksi besarnya sumber daya yang akan dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem informasi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Ada beberapa faktor menurut beberapa penelitian diantaranya adalah Sumber Daya Manusia, Pengendalian intern, Teknologi Informasi, Peagawasan Keuangan, Nilai Informasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, mata tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Infomasi, Nilai Informasi, Sistem Pengendalian Intern,dan Pengawasan Keuangan daerah, berpengaruh secara persial atau tidak terhadap Kualitas Infomasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan untuk mengetahui pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Infomasi, Nilai Informasi, Sistem Pengendalian Intern,dan Pengawasan Keuangan daerah, berpengaruh secara simultan atau tidak terhadap Kualitas Infomasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Keagenan

Pengertian akuntabilitas publik sebagai salah satu kewajiban terhadap pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan (Mardiasmo, 2009 dalam Mansur, 2017) menjelaskan bahwa Permasalahan keagenan muncul ketika eksekutif cenderung dapat memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pada pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk dapat memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini begitu baik, selain itu untuk mengamankan posisinya di pandangan legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan bahwa ketika agen bersikap oportunistis dan cenderung tidak menyukai resiko. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga

bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen yang akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap para pekerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama begitu baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

### **Laporan Keuangan Pemerintah**

Khasmir (2016:66) Laporan keuangan merupakan alat untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan pada tanggal tertentu (*balance sheet*) dan hasil usaha yang telah di capai perusahaan dalam suatu periode tertentu (*income statement*). Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak yang berkepentingan apabila data keuangan tersebut dibandingkan untuk dua periode atau lebih dan selanjutnya dianalisis untuk mendukung keputusan yang akan diambil. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan oleh pemilik perusahaan untuk mengelola sumber-sumber perusahaan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan perusahaannya, manajemen akan mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dan hasil- hasil usaha perusahaan pada masa yang lalu. Hasil ini dapat diketahui kelemahan-kelemahan serta hasil-hasil apa yang di pandang cukup baik.

### **Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia adalah salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun pegawai karena Sumber Daya Manusia (SDM) dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut manajemen Sumber Daya Manusia. Istilah “manajemen” Mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaiman seharusnya *manage* (mengelola) Sumber Daya Manusia. Rivai dan Sagala (2009:1).

### **Teknologi Informasi**

Kadir (2003:12) mengemukakan bahwa Teknologi Informasi adalah segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data atau informasi dari sumber asalnya. Jika informasi dapat diterima oleh pemakai yang membutuhkan, maka informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk akan Mempercepat pengelolaan data dan transaksi dalam Penyajian laporan keuangan.

Dalam hal ini teknologi keluaran mempunyai andil yang cukup besar. Pada umumnya informasi di sajikan dalam monitor. Namun, kadang kala pemakai menginginkan informasi yang tercetak dalam kertas (*hard copy*). Pada keadaan seperti ini, terdapat berbagai peran dalam menentukan kualitas cetakan. Dewasa ini, terdapat berbagai peranti yang mendukung penyajian informasi, termasuk dalam suara.

### **Nilai Informasi**

Kadir (2003:4) Nilai informasi adalah kemampuan yang banyak melibatkan pemakaian dan memerlukan alat media informasi yang memungkinkan untuk pengguna yang akan menggunkanya akan tersebar diberbagai tempat berjauhan yang akan dapat berbagi informasi. Sistem informasi akan memberikan nilai tambah pada proses produksi, kualitas, manajemen, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah serta mendapatkan keunggulan kompetitif yang tentu saja sangat berguna bagi kegiatan bisnis, oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika perusahaan-perusahaan bisnis pada saat ini yang melibatkan komponen perilaku dan teknologi yang berinteraksi di dalam lingkungan sosioteknologi.

### **Sistem Pengendalian Intern**

Sistem pengendalian intern merupakan salah satu fondasi terkuat *good governance*. Sistem pengendalian intern salah satu cara untuk mengarahkan,

mengawasi dan mengukur suatu sumber daya pada suatu organisasi yang meliputi yaitu hasil evaluasi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK, wajar dengan pengecualian WDP, Wajar Tanpa Pengecualian WTP dan tidak memberikan opini. Untuk mencapai berbagai tujuan yang luas tujuan tersebut yaitu akan menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah, dan menjamin pengamanan aset negara. Adapun sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah yaitu pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang relevan untuk pembuatan keputusan. (Budiawan 2014:24)

### **Pengawasan Keuangan**

Ulum (2009:137) menyatakan bahwa Pengawasan keuangan daerah untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya di tetapkan dengan undang undang pasal 23 ayat (5) UUD 1945 hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada dewan pwerwakilan rakyat. Pengawasan dalam setiap kegiatan pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah termasuk didalamnya keputusan kepala daerah yang merupakan akibat mutlak dari adanya negara kesatuan. Dalam rangka pengawasan, pemerintah menciptakan aparat dilingkungan pemerintahan, yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

### **Penelitian Terdahulu**

Mansur, et.al (2017) meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”, menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengambilan data penelitian di peroleh melalui penyebaran kusioner (primer) yang di berikan kepada responden dengan jenis pernyataan dengan pernyataan tertutup. Populasi dari penelitian ini adalah analisis terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah dengan sampel sebanyak 83 responden.

Mahaputra (2014) meneliti tentang ”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Menggunakan metode analisis statistik deskriptif dengan teknik sampel menggunakan proportional stratified random sampling. Populasi penelitian ini berjumlah 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Gianyar yang melaksanakan fungsi akuntansi atau penata usaha keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kapasitas Sumber Daya Manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standart akuntansi berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar.

Arfianti (2011) meneliti tentang ”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Menggunakan metode analisis kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Data penelitian ini di peroleh dari kusioner yang di berikan kepada responden, yaitu kepala dan staf sub bagian akuntansi atau penata usahaan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi atau penata usahaan keuangan pada Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten Batang dengan jumlah 67 SKPD.

### **Hipotesis**

1. Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan  
Menurut Mansur *et.al* (2017) Sumber Daya manusia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi sistem sedangkan menurut Mahaputra (2014) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas adalah yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pelatihan dan pendidikan, dan mempunyai bidang di bagian keuangan sumber daya manusia yang berkualitas akan sangat menentukan maju mundurnya perusahaan dimasa mendatang karna kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan fungsi untuk mencapai suatu tujuan.

H1 : Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan kualitas informasi keuangan.

2. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Afrianti (2011) teknologi informasi terdapat memiliki hubungan positif antara manfaat teknologi informasi dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut Mahaputra (2014) menyatakan bahwa teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Teknologi informasi mempunyai peran yang begitu besar terhadap aktifitas manusia pada saat ini dimana teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memerlukan andil besar terhadap manajemen organisasi agar lebih mudah dalam menangkap data. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware and sofwer*) untuk memproses dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi telekomunikasi untuk penyebaran informasi yang memungkinkan hubungan jarak jauh. komputer seebagai salah satu informasi komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia.

H2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan Keuangan.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mansur *et.al* (2017) dan MahaPutra (2014) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Afrianti (2011) terdapat hubungan positif antara sistem pengendalian intern dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengendalian intern bertujuan untuk memberikan jaminan yang memadai terhadap aset yang dimiliki perusahaan telah diamankan dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan bukan digunakan individu. Pengendalian intern diterapkan agar seluruh aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan, penyelewengan, pencurian dan penyalah gunaan yang tidak sesuai dengan wewenag dan kepentingan perusahaan.

H3 : Pengendalian intren berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah.

4. Pengaruh Nilai Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mansur *et.al* (2017) menyatakan bahwa nilai informasi berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi keuangan Pemerintah Daerah. Penelitain tersebut sama dengan hasil penelitian Mahaputra (2014) dan Afrianti (2011).

Nilai informasi ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Suatu informasi dianggap bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya. Sistem informasi dapat memberikan penilaian tambah terhadap proses produksi, kualitas, manajemen, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah serta keunggulan kompetitif yang tentu saja sangat berguna bagi kegiatan bisnis, oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika perusahaan-perusahaan bisnis pada saat ini dapat melibatkan komponen perilaku dan teknologi yang berinteraksi di dalam lingkungan sosioteknologi.

H4 : Nilai informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

5. Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mansur *et.al* (2017) menyatakan bahwa pemahaman pengawasan keuangan, sistem pengendalian intern, Sumber Daya Manusia, dan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengawasan keuangan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.

H5 : Pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah.

6. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Nilai Informasi, Pengawasan Keuangan terhadap kualitas Informasi Keuangan Daerah

Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Nilai Informasi, Pengawasan Keuangan, berpengaruh sangat simultan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah hal ini bahwa pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara efektif, sedangkan sumber daya manusia yang berkualitas di dinas pemerintahan kabupaten pamekasan digunakan secara optimal, dan teknologi informasi yang ada sudah dimanfaatkan secara optimal juga. Sehingga dapat meningkatkan kendali pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan.

H6 : Sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian intern, nilai informasi, pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif.

### Populasi dan data penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di Kabupaten Pamekasan dengan jumlah SKPD 45. Peneliti menggunakan *Purposive Sampling* atau *Judgmental Sampling*, yaitu cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih 22 subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Cara

memperolehnya dengan menyebarkan kuesioner kepada instansi pemerintah terkait dengan pengiriman secara langsung kepada pihak yang bersangkutan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Koesioner /Angket. Prosedur pengumpulan data melalui kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Nilai Informasi, dan Pengawasan Keuangan sehingga dapat dianalisis pengaruhnya terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Definisi Oprasional Variabel**

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Kualitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi guna mencapai tujuannya.pengelolaan keuangan daerah yang harus mempunyai Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Berdasarkan penelitian (Notoatmodjo, 2003 dalam Mansur, 2017) Variable ini dapat di ukur dengan 3 pertanyaan dengan indikator yaitu:

- a) Pendidikan di bagi menjadi: pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal.
- b) Pelatihan: yang diberikan tenaga ahli, pelatihan yang tepat, materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan pemakai
- c) Pengalaman, dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi dan prestasi pekerjaan.

#### **b. Teknologi Informasi**

Teknologi Informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi serta potensi pemanfaatanya secara luas yang dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan secara cepat dan akurat. Kadir (2003:12)

Variabel ini dapat diukur dengan 2 pertanyaan dengan indikator yaitu:

- a) Memepercepat pengelolaan data dan transaksi
- b) Penyajian laporan keuangan Dengan menggunakan skor 4

#### **c. Sistem Pengendalian Intern**

Sistem pengendalian intern salah satu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur suatu sumber daya suatu organisasi. Budiawan (2014:24) Variabel ini dapat diukur dengan 1 pertanyaan dengan indikator yaitu:

Hasil evaluasi pemeriksaan Inspektorat dalam 5 tahun terakhir. Dengan menggunakan skor point (1 = sangat sesuai (SS), 2 = Sesuai (S), 3 = Tidak Sesuai (TS), 4 = Sangat tidak sesuai (STS).

#### **d. Nilai Informasi**

Kemampuan yang melibatkan banyak pemakaian dan memerlukan sarana informasi yang memungkinkan pemakai yang tersebar diberbagai tempat yang berjauhan dapat berbagi infomasi.

Kadir (2003:4) Variabel ini dapat diukur dengan 4 pertanyaan dengan indikator yaitu:

- a) Relevan, yang relevan memiliki unsur-unsur yaitu, manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, lengkap.
- b) Andal, yang memenuhi karakteristik yaitu penyajian jujur, dapat diverifikasi, netralisitas
- c) Dapat dibandingkan
- d) Dapat dipahami

### e. Pengawasan Keuangan

Pengawasan Keuangan adalah setiap kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otononomi daerah yang merupakan akibat mutlak dari adanya Negara kestan. Dalam rangka pengawasan, pemerintah menciptakan aparat di lingkungan pemerintah. (APIP) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Berdasarkan (Ulum, 2009:137) variabel ini dapat diukur dengan 3 pertanyaan dengan indicator yaitu:

- a) Perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi.
- b) Untuk membandingkan kinerja aktual dengan standart yang telah ditentukan.
- a) Untuk menetapkan Suatu penyimpangan.

### f. Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Merupakan alat untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan pada tanggal tertentu (*balance sheet*) dengan hasil usaha yang telah di capai perusahaan dalam suatu periode tertentu (*income statement*).

Khasmir (2016:66) variabel ini dapat diukur dengan 3 pertanyaan dengan indicator yaitu : Hasil evaluasi Pemeriksaan BPK dalam 5 tahun terakhir

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1 hasil uji  
Coefficients**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,956	,455		2,103	,000
SDM	-,094	,066	-,191	-1,419	,169
Teknologi informasi	,073	,069	,150	1,059	,910
SPI	,920	,059	,963	15,633	,046
Niai informasi	,058	,070	,065	,836	,411
Pengawasan keuangan	-,193	,078	-,167	-2,467	,021

a. Dependent Variable: laporankeuangan

Dari uji t yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa untuk variabel Sumber Daya Manusia memperoleh nilai signifikansi 0,169 nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau  $H_1$  di terima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra (2014) yang menghasilkan bahwa Sumber Daya Manusia tdak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dari hasil penelitian yang menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari uji t yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa untuk variabel Teknologi Informasi memperoleh nilai signifikansi 0,910 nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau  $H_2$  di tolak. Dari hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mansur dkk (2014) yang menghasilkan bahwa Teknologi

Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Maka dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Teknologi Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari uji t yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa untuk variabel Sistem Pengendalian Intern memperoleh nilai signifikansi 0,046 nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau H<sub>3</sub> di terima. Hasil penelitian ini di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra (2014) yang menghasilkan Sistem pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari uji t yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa untuk variabel Nilai Informasi memperoleh nilai signifikansi 0,411 nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Nilai Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau H<sub>4</sub> di tolak. Maka disimpulkan Nilai Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Afrianti (2011) menunjukkan bahwa Nilai Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Dari uji t yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa untuk variabel Pengawasan Keuangan memperoleh nilai signifikansi 0,021 nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau H<sub>5</sub> di terima. Berarti bahwa pengawasan keuangan daerah di dinas-dinas kabupaten Pamekasan belum di terapkan secara efektif, sehingga tidak dapat meningkatkan nilai informasi Laporan Keuangan Pemerintah Dearah Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini di dukung dengan penelitian yang dilakukan Mansur dkk (2017) yang meghasilkan Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**Tabel 2 hasil uji F  
ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	37,329	5	4,466	2,081	,046 <sub>b</sub>
Residual	2,671	24	,111		
Total	40,000	29			

a. Dependent Variable: laporankeuangan

b. Predictors: (Constant),x1, x2, x3, x4, x5

Sumber: data diolah

Dari uji secara simultan (Uji F) yang dilakukan peneliti di atas maka memperoleh nilai 0,021 dari nilai tersebut meunjukkan bahwa variabel Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Sistem Pengendalian Intern, Nilai Informasi, Pengawasan Keuangan, secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan karena nilai  $0,021 > 0,05/5\%$  dari kriteria yang signifikan yang ada.

Pengawasan Keuangan sangatlah penting dikarenakan dengan meningkatkan SDM, Teknologi informasi, Sistem pengendalian intern, Nilai informasi, akan

meningkatkan kepatuhan dalam melakukan kualitas Laporan Keuangan. Karena Pengawasan Keuangan tersebut berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dalam hal ini berarti bahwa pengawasan keuangan dan sistem Pengendalian Intern telah dilaksanakan secara efektif, sedangkan sumber daya manusia yang berkualitas di dinas Kabupaten Pamekasan digunakan secara optimal, dan penggunaan Teknologi informasi sudah di manfaatkan secara langsung. Sehingga dapat meningkatkan keandalan dan informasi yang di dapat oleh laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat membantu mengurangi di resiko kesalahan material yang ada di Kabupaten Pamekasan.

## **SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab di atas dapat disimpulkan bahwa secara persial berdasarkan Uji T dari ke lima variable yaitu Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan sedangkan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Nilai Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Kabupaten Pamekasan. Dan secara simultan berdasarkan hasil Uji F memperoleh kesimpulan bahwa Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Nilai Informasi, pengawasan Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan kabupaten Pamekasan. Dan berdasarkan hasil uji R square hanya 10,9% tingkat pengaruhnya terhadap Kualitas Informasi terhadap Laporan Keuangan kabupaten Pamekasan sedangkan sisanya 89,3% dijelaskan oleh variable lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini khususnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan untuk terus mengembangkan terhadap pengawasan yang ada dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan spaya dapat meningkatkan keandalan pada laporan keuangan pemerintah daerah dan agar membantu mengurangi resiko kesalahan. Hasil dari penelitian ini masih memakai varibel-varibel bebas yang dapat mempengaruhi pada penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya untuk hasil penelitian ini dapat dijadikan refrensi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arfianti, D., & Kawedar, W. (2011). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Studi pada satuan kerja perangkat daerah dikabupaten Batang) (doctoral dissertation, universitas Diponegoro).Badan PenerbitUniversitas Diponegoro: Semarang.
- Budiawan. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal*. Jakarta. Andi.
- Dinas Pamekasan kab, [www.go.id](http://www.go.id).
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS*.
- Hery. 2013. *Konsep Akuntansi dan Auditing*. Yogyakarta. Gava Media.
- Ihyaul, Ulum . *Audit Sektor Publik*. Edisi 1. Jakarta. Bumi Aksara.
- Kadir, Abdul. 2003. *Pengenalan sistem informasi*. Edisi 1. Yogyakarta. Andi.

- Khasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit.Jakarta. Pt RajaGrafindo persada.
- Mahaputra dan Putra. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang mepengaruhi Kualitas Informasi pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah* : E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana hal 230-244.
- Mahaputra, I. P. U. R., & Putra, I. W. (2014). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. E- Jurnal Akuntansi, 230-244.
- Mansur., et.al. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal of applied Accounting and taxation, Vol. 8, No. 2 : 143-152.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansidan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik* :Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 1 : 1-17.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Notoatmodjo, S. (2017). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 SPIP
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi pemerintahan.
- Pamekasan kab.[go.id](http://go.id). Profil
- Republika Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan. 2017 . *BPK Temukan kasus 455 Dugaan korupsi KPK*[www.compas.com](http://www.compas.com)
- Rivai, dan sagala., 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Jakarta. Penerbit. Pt RajaGrafindo persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung ALFABETA, CV.
- Suliyanto. 2009.*Metoderiset bisnis*. Yogyakarta: ANDI
- Sunyoto,D.(2010).*Uji KHI kuadrat dan regresi untuk penelitian*.Yogyakarta: GrahaIlmu.
- Undang-undang 17 Tahum 2003 tentang keuangan negara
- Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Wiyono,G.(2011).*3inone;Merancang penelitian bisnis dengan analisis SPSS 20. 0 & Smart PLS 2.0*.Yogyakarta: UPP STIM.